KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : KPK bakal periksa temuan BPK
Tanggal : Jumat, 13 Mei 2016
Surat Kabar : Republika
Halaman : 8

KPK Bakal Periksa Temuan BPK

● FAUZIAH MURSID

Tidak transparannya laporan dinilai sebab kelemahan internal DPR.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari terlebih dahulu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif anggota DPR. KPK akan memeriksa potensi kerugian Negara yang disebut mencapai Rp 945 miliar.

"KPK akan melihat hasil temuan itu dulu, karena sejauh ini baru melihat dari pemberitaan saja," kata Pelaksaan Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Kamis (12/5). Adapun dugaan kunker fiktif ini merupakan hasil temuan BPK yang berasal dari laporan hasil kunker dan kunjungan di masa reses anggota DPR.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto menilai adanya temuan kunker fiktif senilai hampir satu triliun rupiah tersebut, menunjukan bukti buruknya tata kelola anggaran DPR. Hal itu bukan tanpa alasan, lantaran modus yang digunakan adalah banyaknya anggota DPR yang tidak melaporkan hasil kunjungan kerja baik laporan keuangan maupun laporan kegiatan.

Padahal semestinya, alur pertanggungjawaban seharusnya, anggota melaporkan kepada Sekjen DPR dan kemudian dilakukan audit. "Ini membuktikan kelemahan internal DPR dalam transparansi dan akuntabilitas yaitu seharusnya Sekjen memaksa anggota, melalui fraksi atau komisi untuk melaporkan. Kelemahan ini juga tanggung jawab Sekjen DPR," kata Yenny.

Selain itu, ia juga menilai temuan ini menunjukkan bahwa anggota DPR tidak berkomitmen dalam laporan kunker. Hal ini makin menguatkan bahwa kunker dilakukan hanya untuk plesiran semata. "Dan ini adalah pemborosan anggaran," ujarnya

Lantaran itu, pihaknya mendorong KPK untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK ini untuk diproses secara hukum. Selain itu, pihaknya juga mendesak moratorium dan reformasi anggaran di DPR. Pasalnya, metode keuangan kunker berupa lumsum harus diubah karena model tersebut tidak akuntabel dan menguntungkan anggota DPR. "Juga minta agar fraksi menghukum anggotanya yang tidak melaporkan hasil kunker berupa laporan keuangan dan program," katanya.

Sebagian kalangan di Tanah Air, jauh-jauh hari telah menyoroti transparansi anggaran kunjungan kerja DPR selama ini. "Saya menekankan aspek transparansi. Persoalannya bukan soal sanksi, tetapi transparansi dan akuntabilitas mereka (pimpinan DPR) dalam penggunaan uang negara," ujar pengamat politik Ray Rangkuti, beberapa waktu lalu.

Ray mengatakan, selama ini keterbukaan DPR soal anggaran khususnya kunjungan kerja nihil. Padahal, kata dia, sesuatu yang bisa dihitung dan diduga seharusnya diperlihatkan pada publik, misalnya melalui laman DPR.

"Keterbukaan soal anggaran memang tidak ada. Cek saja di *website* DPR. Sekarang saja, pimpinan DPR pergi sampai 14 orang baru ketahuan sekarang. Sesuatu yang bisa dihitung dan diduga seharusnya ditampilkan di *website* DPR. Supaya masyarakat tahu," kata dia. Selain soal anggaran, kata dia, transparansi juga berlaku untuk jumlah orang yang melakukan kunjungan kerja, bahkan negara mana saja yang menjadi tujuan.

"...seharusnya dijelaskan jumlah anggota berapa, *budget* anggarannya berapa. Baru ketahuan setelah ada masalah. Memang semestinya sudah ada data misalnya dalam setahun sudah berapa kali kunjungan, ke mana saja," ungkap Ray. Hal ini, menurut dia, menyangkut manajemen dalam DPR, yang seharusnya berdasar pada prinsip keinginan untuk melakukan transparansi.

"Semangat ini yang tidak ada. Akibatnya transparansi di DPR tidak ada. Sebetulnya bisa dihitung, berapa *budget* negara untuk kepentingan transportasi dan akomodasi pihak DPR bepergian ke luar negeri," kata dia.

■ antara **ed:** fitriyan zamzami